

# SKRIPSI

**MOHAMMAD NIRWAN**

## **TINJAUAN HUKUM PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DENGAN STATUS HAK PAKAI**

**Studi Kasus Pertanahan Di Desa Sumberanyar, Kec. Nguling, Kab. Pasuruan,  
Jawa Timur Antara Warga Dengan Pihak Prokimal AL**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

# **TINJAUAN HUKUM PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DENGAN STATUS HAK PAKAI**

**(Studi Kasus Pertanahan di Desa Sumberanyar, Kec. Nguling,  
Kab. Pasuruan Antara Warga Dengan Prokimal AL)**

## **SKRIPSI**

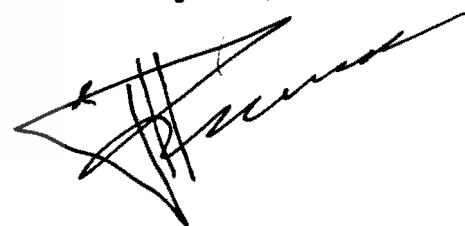
**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Eman Ramelan, S.H., M.S.**  
**NIP. 131 286 715**

**Penyusun,**



**Mohammad Nirwan**  
**NIM. 039714540**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji  
Pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2001**

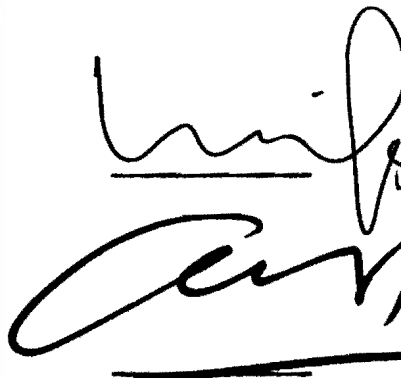

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Sumardji, S.H., M.Hum.**

**Anggota : 1. Eman Ramelan, S.H., M.S.**

**2. Urip Santoso, S.H., M.H.**

**3. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.**



## **Bab IV**

### **Penutup**

#### **1. Kesimpulan**

Dari keseluruhan pembahasan tulisan yang ada diatas, maka dapat saya kemukakan beberapa hal – hal kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa prosedur yang harus dilakukan dalam memperoleh Hak Pakai atas tanah baik itu perorangan, badan hukum maupun instansi pemerintah dan instansi perwakilan negara asing harus mendasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penguasaan dan perolehan Hak Pakai atas tanah yang dilakukan oleh pihak TNI AL adalah mendasarkan pada SK KaKanwil BPN mengenai pemberian Hak Pakai dengan No. 278/ HP/ 35/ 1992 pada tanggal 8 Juli 1992 untuk keperluan proyek pemukiman AL, dimana SK tersebut didasarkan pertimbangan dan pendapat dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pasuruan dengan berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tanah (RPT) yang dilakukan Panitia Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Pasuruan yang tidak prosedural, dimana data fisik maupun data yuridis tidak sesuai kenyataan di lapangan;
- b. Bahwa proses penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi akhir – akhir ini lebih banyak dilakukan melalui jalur diluar pengadilan dimana bentuk demonstrasi, mediasi ke instansi terkait (DPRD) serta meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) baik di wilayah maupun kabupaten agar dapat memberikan suatu keputusan penyelesaian sengketa



pertanahan yang ada, karena BPN sebagai instansi yang berwenang membatalkan hak atas tanah yang meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah.

## **2. Saran**

Dari keseluruhan penulisan ini, maka dapat saya kemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Dalam memperoleh suatu hak atas tanah dengan status Hak Pakai yang dilakukan, maka keseluruhan prosedur baik itu menyangkut data fisik dan data yuridis dari obyek tanah tersebut harus benar – benar mendasarkan pada ketentuan peraturan agraria yang berlaku mengenai Hak Pakai atas tanah, karena untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan yang sah dari subyek hak diatas obyek hak atas tanah yang sama. Praktek penyimpangan yang seringkali dilakukan oleh suatu instansi pemerintah dalam memperoleh hak atas tanah baik itu Hak Pakai maupun dengan status yang lain adalah pada persoalan nilai ganti rugi yang tidak sesuai, persoalan pembebasan tanahnya, dan prosedur yang dilalui tidak sesuai dengan ketentuan peraturan agraria yang berlaku, sehingga menimbulkan konflik sosial pada masyarakat yang akan menimbulkan juga konflik secara meluas. Dalam hal ini perlu diupayakan perlindungan dan jaminan bagi rakyat berupa peraturan perundang – undangan yang seringkali menjadi korban kebijakan pemerintah dalam hal membutuhkan tanah dengan dalih kepentingan pembangunan, kepentingan fasilitas

militer maupun kepentingan lain atas penafsiran subyektif pemerintah sendiri;

- b. Persoalan sengketa pertanahan yang ada apabila tidak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, maka akan dikhawatirkan menimbulkan konflik sosial yang meluas, sehingga harus ada upaya proaktif dan progresif dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sengketa pertanahan yang ada dengan arif, terbuka dan musyawarah dengan para pihak yang bersengketa mengingat Badan Pertanahan Nasional (Pemerintah) sebagai instansi yang dapat menyelesaikan persoalan tanah tanpa melalui jalur pengadilan. Hal ini dikarenakan pengadilan yang ada belum cukup adil dan jujur dalam memberikan putusannya, sehingga selalu merugikan pihak yang lemah posisinya baik secara ekonomi, politik dan sosial dalam hal ini petani. Apabila perlu mulai diupayakan terbentuknya pengadilan agraria yang independen sebagai suatu lembaga peradilan yang dapat menghasilkan putusan yang adil dan sesuai hukum bagi penyelesaian sengketa pertanahan yang ada, karena pengadilan yang ada sekarang ini belum cukup kapabel dalam menangani persoalan pertanahan untuk mencapai keadilan agraria.